

EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN COVID-19 DI INDONESIA: ANALISIS DAMPAK DAN PENERAPANNYA

Ajeng Windi Astuti ¹ Ros Juliana Lubis ² Bonaraja Purba ³

Universitas Negeri Medan

Email:

putrasangketa760@gmail.com

Abstrak

Studi ini menyajikan analisis ekonomi politik yang berfokus pada penilaian dampak tindakan pengendalian COVID-19 dan implementasinya di Indonesia. Melalui pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengidentifikasi dampak ekonomi, perubahan dinamika kebijakan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat. Sudah jelas bahwa respons terhadap pandemi ini akan berdampak besar tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada stabilitas ekonomi dan situasi politik. Evaluasi pelaksanaan kebijakan meliputi koordinasi lintas sektor, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Studi ini memberikan wawasan rinci mengenai hubungan antara politik, ekonomi, dan politik dalam mengatasi krisis kesehatan global.

Kata Kunci: Ekonomi politik, COVID-19, Indonesia, dampak ekonomi, kebijakan kesehatan, dinamika politik.

Abstract

This study presents a political economy analysis that focuses on assessing the impact of COVID-19 control measures and their implementation in Indonesia. Through a multidisciplinary approach, this research identifies the economic impact, changes in policy dynamics, and challenges in implementing public health policies. It is clear that the response to this pandemic will have a major impact not only on health, but also on economic stability and the political situation. Evaluation of policy implementation includes cross-sector coordination, transparency and community participation. This study provides detailed insight into the relationship between politics, economics and politics in overcoming the global health crisis .

Keywords: Political Economy, COVID-19, Indonesia, Economic Impact, Health Policy, Political Dynamics.

PENDAHULUAN

Ekonomi dan politik merupakan pembahasan yang cukup menarik untuk perkembangan ilmu politik dengan tujuan menganalisa kebijakan ekonomi melalui proses politik. Ekonomi politik adalah sebuah bidang studi yang mempelajari tentang interaksi antara kekuasaan politik serta ekonomi disuatu masyarakat. Hubungan antara politik dan ekonomi sangt erat dan terkait satu sama lain, misalnya seperti suatu kebijakan politik dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara tersebut dan sebaliknya hubungan ekonomi yang berjalan dapat menghasilkan suatu kebijakan politik.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan sektor-sektor ekonomi yang beragam, Indonesia merasakan dampaknya secara luas. Industri pariwisata, transportasi, dan perdagangan mengalami penurunan tajam dalam pendapatan sebagai akibat dari pembatasan perjalanan dan lockdown. Seiring dengan itu, sektor manufaktur juga terganggu karena rantai pasokan internasional yang terhenti.

Pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan cukup baik sebelum pandemi tiba-tiba terhenti, bahkan mengalami kontraksi dalam beberapa periode. Tingkat pengangguran meningkat tajam, dan penghidupan masyarakat terdampak karena terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan. Menteri keuangan sri mulyani mengatakan bahwa ada 5 juta orang yang di PHK. Bahkan kadin mengatakan lebih besar lagi, yaitu sekitar 15 juta orang yang terkena PHK di indoensia (stories, n.d.). Tak sedikit perusahaan terkena imbas dari covid 19 ini. Perusahaan-perusahaan terpaksa membuat kebijakan untuk mempertahankan usaha/bisnisnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil seperti terpaksa berhenti melakukan produksi bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Krisis kesehatan global ini juga memiliki dampak politik yang signifikan di Indonesia. Respons awal pemerintah terhadap pandemi ini, termasuk manajemen karantina dan tes, menghadapi kritik keras dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kebijakan lockdown juga memunculkan isu-isu sosial, termasuk penegakan aturan yang kontroversial. Selain itu, respons pemerintah terhadap pandemi menjadi perdebatan politik. Sejumlah kelompok oposisi dan aktivis menyerukan lebih banyak transparansi dalam pelaporan data dan alokasi anggaran COVID-19. Dalam konteks politik yang semakin dinamis menjelang pemilihan umum, pandemi ini telah menjadi bagian penting dalam narasi politik.

Pemerintah Indonesia merespons pandemi dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Ini termasuk pembatasan sosial, peningkatan pengeluaran untuk sektor kesehatan, paket stimulus ekonomi, dan pendanaan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program vaksinasi massal untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun, penerapan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Masalah seperti ketidakcocokan antara tingkat bantuan sosial yang diberikan dan kebutuhan masyarakat serta masalah administratif dalam distribusi vaksin menjadi sorotan utama. Perubahan kebijakan yang terjadi sepanjang pandemi juga menunjukkan tantangan dalam merespons situasi yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Ekonomi Politik Kebijakan Covid-19 Di Indonesia (Analisis Dampak Dan Penerepannya). Penelitian ini akan mencoba menguraikan dan menganalisis dampak ekonomi dan politik dari pandemi COVID-19, serta respons pemerintah dalam konteks Indonesia yang unik. Kami akan mengeksplorasi bagaimana dinamika ini mempengaruhi kebijakan publik, persepsi masyarakat, dan stabilitas politik. Selain itu, kami juga akan memeriksa efektivitas kebijakan yang diterapkan dan dampaknya pada berbagai sektor ekonomi.

TINAJUAN PUSTAKA

A. EKONOMI POLITIK

Ekonomi politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota atau unit politik, mengacu pada politik dan dijelaskan dengan manajemen keluarga yang disebut oikonomike. Konsisten dengan pandangan ini, Adam Smith (1729-1790), seorang ekonom politik Inggris, memberikan banyak penjelasan berbeda. ilmu ekonomi sebelumnya (Lane, 1994: XI). Oleh karena itu, ideologi ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan menjadikan ilmu ekonomi klasik sebagai landasan yang memuat teori ideologi liberal dan hubungannya dengan neoliberalisme. Ada keterkaitan dan sinergi antara pembangunan dan politik yang menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor ekonomi dan salah satu cara untuk mencapainya juga melalui perdagangan bebas.

Ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari metode Permasalahan perekonomian yang timbul pada suatu negara dapat diselesaikan dengan cara Menggunakan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (motivasi) dengan memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi. (Gabung Antara ilmu ekonomi dan politik dapat terdapat makna penjelas (explanatory bagaimana

keduanya berhubungan) dan dapat juga bersifat normatif (bagaimana Hakikat hubungan kedua ilmu itu pasti) (Fahmi,2013;8).

Menurut Yanuar Ikbar yang dimuat dalam buku Mufti Muslim menjelaskan bahwa ekonomi politik pada dasarnya adalah faktor ini/atau faktor menjadi alat ekonomi dan merasionalisasi kekuasaan politik dalam implementasi rencana penerapan ekonomi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mufti, 2013; 176). dalam jumlah besar, Ekonomi politik merupakan rangkaian hubungan timbal balik pengaruh (Mufti, 2013;177).

B. PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

James A Caporaso dan David P Levine menjelaskan beberapa teori yang ada dalam ekonomi politik di dalam bukunya. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Klasik.

Ekonomi politik klasik pada mulanya disebut ilmu ekonomi klasik, karena ekonomi politik berakar pada ilmu pengetahuan ekonomi klasik. Ekonomi politik klasik adalah sebuah subjek khususnya tercermin pada sektor ekonomi yang sedang berkembang di Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal pertengahan abad ke 19. Pemikir ekonomi seperti Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill akhirnya menjadi para Pemikir klasik tentang ekonomi politik. Para ekonom ini memperkenalkan teori ekonomi pasar sebagai suatu sistem pemerintahan sendiri, yang disebut oleh Adam Smith seperti "tangan tak terlihat". Adam Smith dengan bukunya yang terkenal "The Wealth of Nations" pada tahun 1776 dianggap menandai dimulainya perekonomian klasik. Pesan dasar dari buku Adam Smith adalah: kekayaan negara-negara di dunia, berdasarkan pendapatan bangsa. Pendapatan ini didasarkan pada pekerjaan penduduk di sini dan ini dapat dengan mudah dicapai dengan pembagian kerja dan penggunaan akumulasi modal telah menjadi salah satu konsep sentral ilmu ekonomi klasik.

2. Pendekatan Marxian Dalam Ekonomi Politik.

Ada kaum Marxis yang melihat politik sebagai perpecahan antara masyarakat sipil di ruang publik (dimana persamaan hak dianggap hanya ada di ranah publik), politik mempunyai peran yang harus dimainkan nyatakan dalam manajemen manfaat. Pendekatan Marxis ekonomi politik, berupaya memahami hubungan antar negara dengan perekonomian.

Teori Marxis lebih fokus pada proses reproduksi bersifat objektif dan tidak memfokuskan penelitian pada prosesnya subjektif, yaitu menentukan peringkat peluang atau menentukan pilihan oleh individu. Konsep kelas

merupakan konsep dasar teori Marxian. Istilah ekonomi politik digunakan dalam teori Marxis mengacu pada cara berpikir tentang ekonomi berdasarkan metode dan teori para pemikir ekonomi klasik. Metode ini menekankan pada gagasan ekonomi pasar beroperasi berdasarkan prinsip regenerasi dan perluasan system saling ketergantungan material antar manusia, pembagian kerja sosial. Tiga tren dalam pendekatan Marxis, yaitu politik revolusioner, politik kompromi kelas, teori negara Marxis (Caporaso dan Levine, 2015; 123-178)

Marxisme artinya kekayaan berasal dari kerja manual dan pertukaran, bukan kecerdikan dan semua individu harus bermanfaat bagi perekonomian. Lokal dengan pemahaman Marxisme, terjadi ketimpangan adalah hal yang buruk. Perekonomian dipertimbangkan sebuah permainan kurang lebih, berdasarkan negara Nasionalisme ekonomi, yaitu kekayaan berasal dari yang menggunakan kekuatan dan menggunakan kekuatan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk akumulasi kekayaan. Setiap individu harus bekerja untuk kepentingan kekayaan dan kekuasaan bangsa. Untuk negara yang didirikan atas dasar nasionalisme perekonomian, maka yang penting adalah kedudukan negara, melainkan individu tidak begitu penting.

3. Ekonomi Politik Neoklasik

Gagasan utama pemikiran neoklasik adalah “pilihan terbatas” (pilihan terbatas). Konsep ini menganggap individu sebagai pelaku orang utama yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih beberapa tindakan alternatif berdasarkan perspektif atau imajinasi seseorang dirinya sendiri tentang dampak dari setiap pilihan pada diri Anda sendiri (Caporaso dan Levine, 2015; 184).

Membangun pengetahuan Ekonomi politik berdasarkan pendekatan neoklasik juga sama dengan mempertimbangkan masalah kegagalan pasar (karena pendekatan yang benar-benar neoklasik tanpa politik dan banyak lagi penekanannya pada perekonomian, diperlukan kebijakan baru sementara jika perekonomian rusak, atau dengan kata lain pasar rusak). Ekonomi politik neoklasik mengkaji situasi di mana pasar ada telah gagal memberikan individu kesempatan untuk melakukannya mencapai tingkat kepuasan kebutuhan setinggi mungkin tergantung pada sumber daya yang tersedia (Caporaso dan Levine, 2015; 202).

Teori neoklasik mendominasi pemikiran ekonomi dengan pemberantasan pemikiran ekonomi politik ketika spesialisasi ilmu-ilmu sosial dan tekanan kelas kapitalis berkuasa pada saat itu. Titik tolak analisis teori neoklasik

adalah individu, lebih tepatnya ciri-ciri alamiah individu. Tiga asumsi utama yang digunakan yaitu:

- a. Orang akan membuat pilihan rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka.
- b. Manusia dapat dan akan mengubah lingkungan hidup menjadi barang-barang yang diperlukan secara langsung atau tidak langsung bagi konsumen.
- c. Manusia diberkahi dengan kemampuan untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan. Sifat-sifat kodrati manusia dianggap sudah ada. Sedangkan ekonomi dan sosial dapat dipahami dan pada akhirnya ditentukan oleh sifat manusia tersebut.

Dengan kejayaan pemikiran ekonomi neoklasik di kalangan ahli ekonomi akademik, pendekatan lebihan telah dihapuskan dan digantikan dengan anggapan kos sebagai beban subjektif. Malahan, sewa juga tidak dianggap sebagai lebihan lagi, tetapi sebaliknya dianggap sebagai pulangan kepada tanah, buruh dan modal, iaitu sebagai harga kekurangan, maka kekurangan sahaja yang mempunyai kos sosial. Akibatnya, beberapa pandangan Quesnay, Ricardo dan Marx yang terbaik dihapuskan bersama-sama konsep lebihan dan ilmu ekonomi telah dijadikan pengajian tentang pensamaan harga, tanpa menunjukkan bagaimana bahagian-bahagian sistem ekonomi berkait antara satu sama lain.

4. Ekonomi Politik Keynesian

Para pemikir Keynesian percaya bahwa stabilitas dan Kelengkapan fungsi pasar dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme otomatis, yaitu penggunaan sarana administratif, bukan politik. Pendekatan Keynesian berfokus pada pada destablisasi proses reproduksi dengan pertumbuhan internal perekonomian kapitalis. Keynes menyimpulkan bahwa jika Perekonomian kapitalis dibiarkan berjalan tanpa campur tangan terjadi ketika sumber daya yang tersedia tidak digunakan penuh. Dengan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus untuk menjamin kestabilan proses reproduksi dan memiliki pekerjaan yang cukup (Caporaso et Levine, 2015; 238-243).

5. Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik

Dalam pendekatan ini terdapat pendekatan pragmatis. Eric Nordlinger mencoba menerapkan pendekatan utilitarian Negara-negara bertindak sesuai dengan agenda mereka sendiri. Ketentuan "Negara" menurut Nordlinger mengacu pada semua individu yang memegang posisi yang otoritasnya diberikan oleh posisi tersebut, bagi individu untuk membuat

dan menerapkannya Keputusan tersebut mengikat seluruhnya atau sebagian dari sektor sosial.

Menurut Caporaso dan Levine (1993) dalam buku Deliarinov mengatakan tidak perlu memulai pendekatan yang berpusat pada negara dengan kegagalan pasar dalam menentukan peran politik peran ekonomi. Jika negara memiliki tujuannya sendiri, dan jika mengejar tujuan-tujuan ini masuk akal peristiwa dan institusi ekonomi perekonomian, Negara dapat mengendalikan perekonomian sehingga tidak melakukan hal tersebut mengendalikan kegagalan pasar tetapi juga untuk mencapai tujuan Sendiri. Negara mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi dan mengadili agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan pribadi.

Menurut Marx: Ekonomi politik mempunyai sifat menyembunyikan jarak dalam hubungan antar pekerja dengan tidak membandingkan hubungan antara pekerja (pekerja) dan produksi. Faktanya adalah para pekerja menciptakan hal-hal luar biasa untuk menjadi kaya, namun bagi para pekerja, hal tersebut adalah privatisasi. Pekerja menciptakan sebuah kastil, tetapi bagi pekerja itu hanyalah sebuah gubuk. Pekerja menciptakan keindahan, tapi bagi pekerja itu adalah keburukan. Keberadaan buruh tergantikan oleh mesin, namun hal ini mendorong buruh kembali melakukan pekerjaan barbar dan mendorong pihak lain menjadi mesin. Akan menciptakan kecerdasan, tapi bagi pekerja itu bodoh dan singkat.

METODOLOGI PENELITIAN

A. PENDEKATAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami berbagai aspek yang kompleks terkait pandemi COVID-19. Menurut KBBI, Kuantitatif artinya berdasarkan jumlah atau banyaknya. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak. Bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas (nanda, 2022). Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi.

Sementara itu, Lexy J. Moleong (2005:6) mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan, dari segi bahasa dan dalam konteks alam tertentu, dengan menggunakan berbagai metode alam (a, n.d.). pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memahami implikasi politik dan

partisipasi masyarakat melalui wawancara mendalam, analisis isi dokumen, dan studi kasus.

B. PENGUMPULAN DATA

Data diperoleh melalui internet (searching) merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat pencari diinternet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Data ekonomi makro akan diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Data politik dapat diperoleh dari survei opini publik, laporan media, dan dokumen-dokumen kebijakan.

C. ANALISIS DATA

Metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet serta literature review. Metode studi pustaka ini digunakan karena untuk mencari landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan pemecahan masalah dan pemikiran untuk perumusan hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintahan yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan pemerintahannya dan pelaksanaan kebijakannya adalah lembaga kepolisian. Ada keterkaitan antara penegakan hukum dengan proses legislasi, penegakan hukum yang baik dan bertanggung jawab dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang baik yaitu sesuai keadaan atau kebutuhan. Dalam hal penegakan hukum, peraturan atau ketentuan yang dibuat harus memenuhi tiga unsur, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masyarakat sangat berharap dapat mengambil manfaat dari kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum di masa pandemi Covid-19.

Penegakan hukum dalam arti sempit hanya sebatas aparat kepolisian, dimana aparat menjamin bagaimana peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi sesuai nilai dan aturan, sedangkan dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. aparat kepolisian. politik dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti luas juga mencakup masyarakat, sehingga masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan pemerintah agar

dapat berfungsi secara efektif. Implementasi kebijakan atau peraturan pemerintah memerlukan kesadaran hukum, serta kepatuhan terhadap hukum. Misalnya kita tahu dilarang mengendarai mobil di lampu merah. Ini adalah kesadaran hukum. Namun jika sepi dan tidak ada polisi lalu lintas di dekatnya, sering kali lampu merah menyala. Namun apabila supremasi hukum ditaati dan menjadi jiwa masyarakat Indonesia, maka implementasi hukum atas kebijakan atau peraturan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M Friedman yang mengatakan bahwa kepolisian dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu komponen material, budaya dan struktural yang ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan hukum (H Asep Suparman, 2013).

Penegakan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait pelanggaran pada masa pandemi Covid-19 dapat disikapi secara proaktif dan proaktif. Penerapan anjuran dan imbauan seperti menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan serta memakai masker merupakan upaya untuk melawan pandemi corona ini. Selain itu, polisi yang represif juga bisa diterapkan karena instruksi dan peraturan pemerintah yang disusun dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak dilaksanakan. Lembaga penegak hukum dapat mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Tindakan represif dikenakan sanksi atau hukuman. Pemerintah memberikan sanksi atau hukuman berdasarkan tanggung jawab dan hanya untuk menjamin keselamatan masyarakat terhadap virus corona.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, wilayah, kesadaran hukum dan budaya hukum (Soerjono Soekanto, 1983). Pembahasan pertama menyangkut hukum itu sendiri. Apabila dilaksanakan maka perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah harus bersinergi dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan di seluruh bidang pemerintahan pusat dan daerah serta dengan masyarakat. Banyak pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam melawan Covid-19. Implementasi kebijakan seringkali menghadapi hambatan dan hambatan.

Jika kita melihat pandemi Covid-19, implementasi kebijakan terhambat oleh ego industri yang tumpang tindih. Misalnya pada masa PSBB, larangan tersebut berlaku pada beberapa sektor usaha, namun pada saat yang sama, atas arahan Menteri Perindustrian, izin baik diberikan kepada perusahaan dari luar, tidak termasuk sektor ekonomi (Mata Najwa, 2020b). Permasalahan seperti ini merupakan kendala yang dapat menghambat terciptanya kebijakan kepolisian. Perlu dipahami bahwa pemerintah tidak bisa menangani pandemi ini sendirian.

Diperlukan sinergi antara lembaga negara, kementerian bahkan tingkat kabupaten, desa, dan masyarakat. Namun, dengan kebijakan yang tumpang tindih tersebut, evaluasi dan koordinasi dapat dilakukan untuk menentukan tindakan terbaik.

B. DAMPAK EKONOMI

Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak persoalan, khususnya pada perekonomian indonesia. perekonomian indonesia terlihat memburuk, secara global juga diperkirakan pada tahun 2020 akan jatuh seperti depresi pada tahun 1930. Situasi ini mengakibatkan adanya penurunan perdagangan didalam negeri bahkan sampai perdagangan internasional. Tidak hanya itu, diberbagai sektor juga terhambat untuk beroperasi, seperti pabrik-pabrik yang berhenti untuk beroperasi karena situasi yang sudah tidak memungkinkan.

Dilansir dari dprd-diy.go.id, Dr. R. Stevanus C. Handoko S. Kom., MM anggota DPRD DIY yang menyebutkan bahwa ada 5 pengaruh besar pandemi covid-19 untuk perekonomian indonesia. pengaruh yang pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga. Turunnya konsumsi rumah tangga diakibatkan oleh adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) efek dari covid-19. Selain itu, pendapatan yang menurun juga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Pengaruh kedua yaitu berkurangnya investasi diberbagai sektor usaha. Pandemi COVID-19 menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam bisnis. Kondisi ini membuat banyak investor enggan mengambil risiko dengan berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu karena sulitnya meramalkan dampak jangka panjang dari pandemi. Selain itu, Masa pandemi COVID-19 telah mengganggu kegiatan bisnis secara signifikan. Lockdown, pembatasan sosial, dan ketidakpastian seputar perkembangan pandemi membuat banyak perusahaan ragu untuk berinvestasi karena mereka sulit memprediksi hasil investasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Pengaruh yang ketiga adalah lemahnya ekonomi daerah dan nasional. Lemahnya ekonomi daerah dan nasional selama pandemi COVID-19 disebabkan oleh sejumlah faktor ekonomi yang signifikan. Salah satu penyebab lemahnya ekonomi daerah dan nasional adalah adanya Pembatasan pergerakan, lockdown, dan ketakutan akan penularan virus menyebabkan penurunan signifikan dalam permintaan konsumen untuk berbagai produk dan jasa. Hal ini berdampak negatif terhadap sebagian besar sektor ekonomi.

Pengaruh yang keempat ialah adanya pergantian berbagai bentuk bisnis dan penerapan berbagai bentuk bisnis yang tidak biasa. Pembatasan keleluasaan

dalam berinteraksi dimasyarakat dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi menimbulkan adanya perubahan model bisnis di masa covid-19. Shifting ekonomi konvensional yang sebelumnya masih memerlukan waktu untuk menerapkannya dimasyarakat, kini secara terpaksa harus dituntut untuk membiasakan dengan bentuk bisnis yang baru.

Pengaruh yang terakhir adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memainkan peran yang sangat penting selama masa COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Akan tetapi bagi para pebisnis yang belum mampu menggunakan teknologi tersebut menjadi hambatan untuk bisnisnya.

Dalam situasi pandemi, sektor publik memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak besar pandemi COVID-19 menekankan pentingnya perencanaan tanggap darurat, kapasitas layanan kesehatan, kebijakan ekonomi, dan komunikasi efektif dalam pengelolaan krisis semacam ini.

C. IMPLIKASI POLITIK

Pilkada Indonesia 2020 yang sedianya digelar pada 23 September ditunda, dan KPU RI mengusulkan untuk memindahkannya paling cepat ke 9 Desember, yang kemudian disetujui DPR dan kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden. Joko Widodo. 5 Mei. Anggaran pemilu sebelumnya, sekitar \$550 juta, dialokasikan kembali untuk mengelola dan mengendalikan pandemi ini. Kekhawatiran pemerintah terhadap pandemi COVID-19 Partai Demokrat Indonesia yang terjadi setiap lima tahun sekali, termasuk persiapan yang dilakukan masing-masing partai dan calon rival politiknya, membuat beberapa kelompok politik kebingungan.

Setiap parpol dan kompetitor harus menarik perhatian pemilih misalnya dengan kampanye dan program kerja, visi dan misi sosial, namun di sisi lain, pandemi Covid-19 mengharuskan parpol, kompetitor, dan masyarakat untuk memantau kesehatan Covid-19. 19. 19. protokol. berdasarkan rekomendasi pemerintah. lokal Hal ini membuat masing-masing partai dan pesaing harus bekerja lebih keras lagi untuk menggalang suara dalam pemilu, karena tanpa kampanye dan imbauan kepada partai dan pesaing, sulit meyakinkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia membawa perubahan di berbagai bidang, salah satunya dunia politik. Seharusnya pemerintah memanfaatkan krisis ini untuk mendekatkan diri atau kembali kepada konstituennya sebagai wakil rakyat, dibandingkan mencari keuntungan materi atau politik.

Selain itu, peran media juga menjadi pusat perhatian dalam mengusut situasi ini, karena banyak media yang hanya menyebarkan informasi yang memperburuk kondisi masyarakat. Media hanya memperhatikan klasifikasi tanpa mengedepankan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Di bidang politik, seperti pemilu, pandemi Covid-19 memaksa para akademisi dari kampus ternama seperti Universitas Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Beberapa peneliti mengusulkan pemilu dilanjutkan dengan sistem pemilu perwakilan atau demokrasi perwakilan berbasis digitalisasi. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas pemilu ketika pandemi Covid-19 memaksa segala sesuatunya dilakukan secara digital atau bahkan online.

Konsensus yang lahir dari pandemi Covid-19 adalah banyak kegiatan pengambilan keputusan akan dilakukan secara online, menggunakan data dan perangkat digital elektronik. Digitalisasi yang terjadi pada masa pandemi memungkinkan sistem pemilu di masa depan dilakukan secara online. Akibat pandemi Covid-19, Indonesia harus memulai kembali hubungan politik dengan beberapa negara lain. Tujuan hubungan diplomatik yang dijalin Indonesia adalah untuk memaksimalkan penyelamatan WNI di luar negeri, salah satunya kerja sama pencarian vaksin Covid-19. Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asing seperti Tiongkok membuat Amerika Serikat tidak nyaman karena berbeda kubu politik.

Pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 memberikan beberapa tantangan bagi penyelenggara dan peserta pilkada, seperti peningkatan pendanaan pilkada sebagai praktik demokrasi langsung, karena masyarakat berpartisipasi di dalamnya, dan di sisi lain, negara masih tetap berperan dalam pemilukada. membutuhkan pendanaan untuk menyelesaikan dan mengatasi pandemi Covid-19 serta melaksanakan praktik demokrasi dalam pilkada harus memenuhi sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam Partai Demokrat dengan berbagai keterbatasan melalui fisik. menjauhkan diri politik pemerintah.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian ini menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi politik kebijakan COVID-19 di Indonesia, dengan fokus pada analisis dampak dan penerapannya. Pandemi COVID-19 telah menguji daya tahan dan respons pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis multidimensional yang

melibatkan aspek kesehatan, ekonomi, dan politik. Berikut adalah kesimpulan yang muncul dari penelitian ini:

1. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Respons pemerintah melibatkan pembatasan sosial, stimulus ekonomi, peningkatan pengeluaran kesehatan, dan program vaksinasi massal. Kendati terdapat kritik pada respons awal yang dianggap lamban, pemerintah kemudian meningkatkan kapasitas tes, pelacakan, dan vaksinasi.
2. Pandemi ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan. Terjadi kontraksi ekonomi dalam beberapa periode awal pandemi, dengan sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan menjadi yang paling terpuak. Pengangguran meningkat tajam, dan terdapat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Walaupun terdapat pemulihan ekonomi, tantangan ekonomi masih ada dan memerlukan perhatian serius.
3. Pandemi ini telah mengubah dinamika politik di Indonesia. Pemerintah menghadapi kritik keras atas manajemen awal pandemi dan penanganan vaksinasi. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan popularitas dalam beberapa survei opini publik, meskipun masyarakat terbagi dalam pandangan mereka terhadap respons pemerintah. Kelompok oposisi menekan pemerintah dalam beberapa isu, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengeluaran stimulus.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya belajar dari pengalaman pandemi COVID-19. Kesimpulan ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dalam menghadapi krisis serupa di masa depan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara sektor kesehatan, ekonomi, dan politik untuk menghadapi krisis serupa dengan lebih efisien dan efektif.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah rekomendasi dapat diajukan:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi krisis serupa di masa depan.
2. Penguatan infrastruktur kesehatan dan kapasitas untuk merespons wabah serta perbaikan dalam koordinasi distribusi vaksin.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stimulus ekonomi.
4. Pengembangan program pelatihan dan pengembangan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat terhadap krisis.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang ekonomi politik kebijakan COVID-19 di Indonesia dan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis serupa di masa depan. Kesimpulan ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- a, Q. (N.D.). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, Dan Prosedurnya*. Retrieved From Gramedia.Com:
<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
- Admin. (2021, Agustus 26). *Dampak Besar Pandemi Di Sektor Ekonomi*. Retrieved From Dprd-Diy.Go.Id: <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>
- Djumena, A. (2020, Oktober 6). *Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah*. Retrieved From Money.Kompas.Com:
<https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah>
- Febriandiela, F., Yulhendri, & Magriasti, L. (2023). *Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia Dan Tanggapan Masyarakat Di Desa Pantai Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 79-88.
- Kondisi Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19*. (2020, Juli 2). Retrieved From Uii.Ac.Id: <https://www.uii.ac.id/ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Nanda, S. (2022, November 11). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contohnya*. Retrieved From Brainacademy.Id:
<https://www.brainacademy.id/blog/penelitian-kuantitatif>
- Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori Dan Praktek*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Razak, A., & Elyta. (2018). *Ekonomi Politik Anata Teori Dan Praktek*. Pontianak: Top Indonesia.
- Stories, F. (N.D.). *Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Era Pandemi Perspektif Hukum: Tak Mudah Perusahaan Lakukan Phk!* Retrieved From Uta45jakarta.Ac.Id: <https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/>
- Suleman, N. H., Parenrengi, F., & Oelfa, T. K. (2021). *Ekonomi Politik Indonesia Saat Ini, Kebijakan, Penerapan Serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado*. *Jurnal Of Islamic Economics*, 27-33.
- Tampubolon, E., Alamsyah, S., & Pantas, H. (2022). *Ekonomi Politik*. Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada.